

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 PASAL 8 TENTANG
HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh:

**WAHYU SAPUTRA
NPM: 1221020007**

**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag**

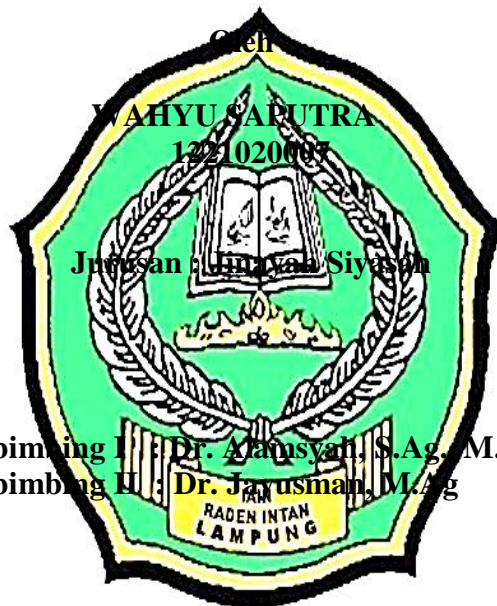
Program Studi: Jinayah Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN
INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 PASAL 8 TENTANG
HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Jarusman, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIA'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Karena di Indonesia semakin banyak kasus pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh suaminya lantaran sang istri tidak mau menuruti kemauan seksual sang suami, dan apa hukuman yang pantas bagi suami pelaku pemaksaan hubungan seksual terhadap sang istri menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga yang pemidaan nya masih diatur dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 46.

Bagaimana hukum Islam memandang larangan pemaksaan hubungan seksual sebagai mana yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PHRT.

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- a. Ingin mengkaji dan menganalisa menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemaksaan hubungan seksual.
- b. Ingin mengetahui dan membandingkan hukuman yang diberikan kepada pelaku menurut hukum pidana Islam dan KUHP.

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.

Library research (kepuustakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian.

Jadi dalam pandangan Islam, walaupun pada dasarnya suami berhak menuntut dari pasangan untuk di penuhi keinginannya, tetapi hendaklah memperhatikan kondisi dan kesiapan masing- masing agar mawaddah dan warahmahnya dapat tercapai.





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 PASAL 8 TENTANG HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL**

Nama : **Wahyu Saputra**

Npm : **1221020007**

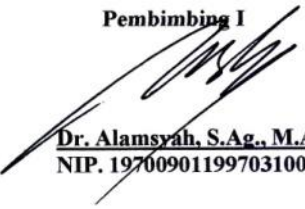
Program Studi : **Jinayah Siyasah**

Fakultas : **Syari'ah**

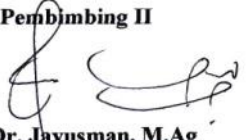
MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan di Pertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II


Dr. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**


Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 PASAL 8 TENTANG HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL** disusun oleh **Wahyu Saputra, NPM. 1221020007**, Program Studi: **Jlayah Siyasa**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal:



Ketua

Kumedi Indar, S.Ag., M.H

Sekretaris

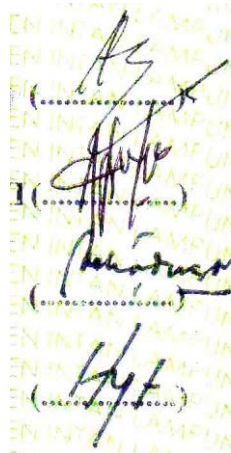
Amr Fikri, S.Ik., M.Ag

Penguji I

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II

: Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَحْلٌ لَّكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulilah dengan mereka seperti patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka[(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papah ku tercinta Jahari dan mamahku tercinta Susiawati, terimakasih mamah papah atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada mamah dan papah.
2. Kakak-kakak ku Lovia Isnaini, Ibrahim, Chintia Swisri, Mahmmud Nasim dan Adikku Ismah Inayah, Serta Keponakan ku Kamil Dzaki Aqisahan Nazwa yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Sahabat-sahabat superku Parwoto, Kurniati, Ahmad ferdians dede Wardana, Agung Rahmadhan, Sitimaryam, Merlia Anggrani, Vania Afranida, Cutfy Soma, Iwan, Suandi Helmi, Mds Jatri, Sagun Kenji dan teman-teman yang ada di kosan Nisa Dua.
4. Yang kebanggaan mamahku tercinta IAIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

WAHYU SAPUTRA dilahirkan di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada tanggal 13 Desember 1993, anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Jahari dan Ibu Susiawati. Adapun riwayat pendidikan, sebagai berikut:

1. TK Darma Wanita Kertosari, lulus pada tahun 2000
2. SD Negeri 2 Kertosari, lulus pada tahun 2006
3. MTS Assalam Tanjung Sari, lulus pada tahun 2009
4. SMA Assalam Tanjung Sari, lulus pada tahun 2012
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program Sarjana (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Inayah, Pesan, Tindakan Pidana & Hukum Tata Negara



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 PASAL 8 TENTANG HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL.

skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat terdapat kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Karena itu, koreksi dan kritik yang proposional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Moh. Mukhlis M. Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lmpung
3. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Frenki, M.Si. selaku sekretaris Jurusan Jinayah Siyasaah IAIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Maimun, S.H., M.A. Selaku penguji I dan Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag Selaku penguji II,

yang telah menyediakan waktu dan fikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku, kakak, adik, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2012 Sahabat-sahabat superku Parwoko, Kinanti , Ahmad ferdian, Agung Ramadhani, Siti maryam, Merlia Anggraini, Yoni Afranda, Soma, Ivan, Suandi, Helmi, Opek, Panji, Dede haddawi dan teman-teman yang ada di kosan Nura Dua
9. Dan yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu trimakasih atas semangat yang kalian berikan
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku



Bandar Lampung, Maret 2017

Penulis

Wahyu Saputra

1221020007

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-------------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| A. Pengertian Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| F. Metode Penelitian | 8 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Hubungan Seksual dan Pemaksaan Hubungan Seksual | 13 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam dan Perundang-undang | 17 |
| a. Hak dan Kewajiban Suami..... | 18 |
| b. Hak dan Kewajiban Istri | 18 |
| c. Dasar hukum larangan pemaksaan hubungan seksual menurut Islam | 25 |
| d. Faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dalam pemaksaan hubungan seksual..... | 27 |
| C. Etika hubungan Seksual Dalam Islam | 28 |

BAB III PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM UU PKDRT

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Isi Undang-Undang PKDRT..... | 39 |
| a. Pengaturan Hukuman Pidana Dalam Kasus UU PKDRT | 41 |
| b. Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 42 |
| c. Akibat KDRT | 44 |
| B. Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam UU PKDRT | 44 |
| C. Sangsi Bagi Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual.. | 49 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| Pandangan Hukum Islam Terhadap UU PKDRT Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri | 53 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran | 58 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 PASAL 8 TENTANG HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL”** Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berdasarkan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil penilaian atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, menelaah dan sebagainya).
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah yang memahkotasi tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang di akui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²
3. Bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual adalah : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara.
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual; atau
 - d. Penelantaran rumah tangga.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.112

²Amir Syariffudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 9

³Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan KDRT*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 5

4. Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan tindakan. Kata larangan sangat sering kita dengar dan kita lakukan, bahkan setiap hari kita melakukan sesuatu hal yang menjadi larangan.
5. Pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri adalah paksaan atau koersi praktik memaksa dari seorang suami kepada sang istri untuk menuruti keinginan biologis sang suami dengan cara paksa meskipun sang istri menolak.
6. Hubungan biologis suami-istri yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri dengan alasan istri yang sedang sakit, menstruasi, tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk melayani sang suami dan banyak hal yang memang membuat sang istri enggan untuk melayani suami. Seksual adalah secara prinsip yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga mencakup pada tindakan lain yang berhubungan atau menggantikan tindakan biologis, jadi lebih dari sekedar menunjukkan pertemuan antara Alat kelamin laki dan perempuan. Seksual berkenaan dengan seks, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah persetubuhan antara laki dan perempuan (khusus diantara manusia).



Jadi kesimpulan dari penegasan judul ini ialah, hukum Islam meninjau dari judul skripsi yang penulis buat berdasarkan al-Qur'an dan Hadits sedangkan KUHP sebagai alat dari hukum positif meninjau permasalahan ini berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT. Dan penulis hanya membahas perihal pemaksaan hubungan seksual terhadap istri yang dilakukan oleh suami, namun bukan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak ataupun majikan terhadap pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.432

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis yang mendorong memilih judul skripsi tersebut adalah:

1. Alasan Obyektif

- a. Karena di Indonesia semakin banyak kasus pemaksaan hubungan seksual yang dibarengi dengan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya lantaran sang istri tidak mau menuruti kemauan seksual sang suami.
- b. Dan juga untuk mengetahui hukuman untuk pelaku pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya.

2. Alasan Subyektif

- a. Banyak tersedianya buku penunjang untuk memenuhi kebutuhan penulisan skripsi ini serta membahas permasalahannya sehingga nantinya penulis dapat selesai tepat pada waktunya.
- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syaria'ah jurusan jurnalisah siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Karena di Indonesia semakin banyak kasus pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh suaminya lantaran sang istri tidak mau menuruti kemauan seksual sang suami, dan apa hukuman yang pantas bagi suami pelaku pemaksaan hubungan seksual terhadap sang istri menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga yang pemidaan nya masih diatur dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 46. Karenanya penulis sangat tertarik untuk membuat suatu karya tulis yang penulisannya ditungkan dalam skripsi ini.

Ada seorang ulama mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang

sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.⁵

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa di kemukakan di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 187 yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَلَّيْنَا عَنْكُم مِّن دُونِ فَتْنٍ مِّنْ بَشَرٍ وَهُنَّ وَابَتَغُوا مَا سَبَّحْتُمُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَفَجَّرْنَا عَلَيْهِمْ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيُسْرِ وَأَلَّا تَمَسُّوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

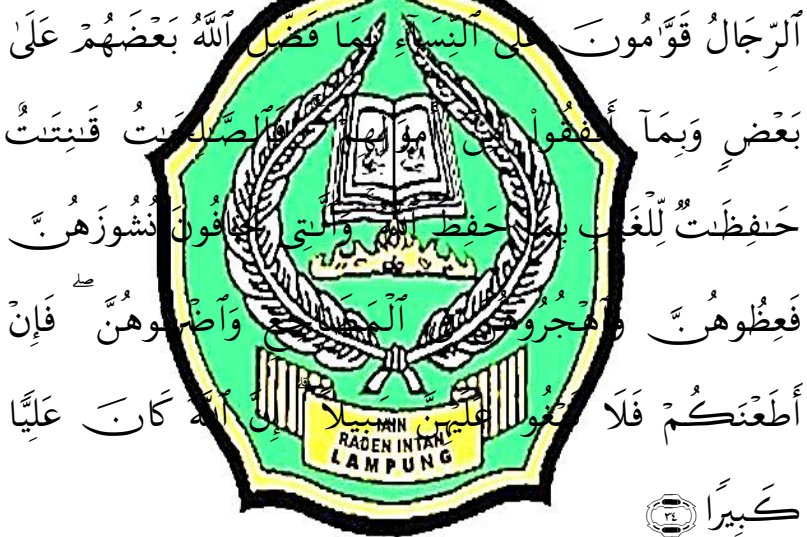
اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan

⁵Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Bandung, Cet. II, 1997), h. 113.

carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (al-Baqarah: 187).⁶

Dasar yang menjadi dalil hak-hak suami atas istri adalah firman Allah berikut ini QS. Al-Nisa' 4: 34,



“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi wanita (istri), karna Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka wanita-wanita yang sholehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah

⁶Depag. al-Qur'an dan terjemahannya, h. 36

ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahakan nya.(QS. An-Nisa' 34)”⁷

Ada suatu perkara sebagai syarat kehalalan bersetubuh setelah keabsahan akad, yaitu sebagai berikut:

Tidak ada yang mencegah secara syara' atau tabiat yang mengharamkan untuk berhubungan seksual. Tidak halal suami bersenang-senang dengan istrinya sedangkan mereka berdua sedang berihram haji atau umrah, atau keduanya berpuasa wajib atau iktikaf. Demikian pula haram jika salah satunya berihram, atau puasa wajib, atau iktikaf. Mereka juga haram melakukan hubungan Seksual ketika istri sedang dalam keadaan menstruasi atau haid, sebagai mana firman Allah⁸:



Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “*haidh itu adalah suatu kotoran*”. Oleh sebab itu, *hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh; dan jangan lah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apa bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai*

⁷Depag. al-Qur'an dan terjemahannya, Op.Cit, foot note h.108

⁸ Abu malik kamal bin sayyid salim, Shahih fiqih sunah Wanita, Al-hambra, 2012, Solo, h.521-522

*orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS.Al-Baqarah (2): 222)*⁹

Jadi tidak diperbolehkan suami memaksa istrinya dalam berhubungan seksual, jika sang istri sedang menstruasi ataupun dalam keadaan nifas¹⁰.

KDRT yang terjadi akibat pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh sang suami kepada sang istri, memang tidak dibenarkan dalam agama kita karna pada dasarnya pemenuhan kebutuhan batin dari sebuah pernikahan itu yang diutamakan karena harus ada saling rela dan ikhlas melakukan persenggamaan tersebut antara suami dan istri. Jika tidak kejayaan kekerasan seksual dalam rumah tangga pasti akan terjadi sebab sang suami tidak bisa mengontrol hasrat biologisnya terhadap sang istri. Maka dari itu harus ada saling pengertian di antara keduanya agar kekerasan dalam hubungan seksual tidak terjadi.

Dengan cara itu harus memberikan alasan kepada suami bahwasanya pada saat ini dia sedang tidak bisa melayani suami karna ada alasan yang dibenarkan oleh agama seperti sedang ber-haid, berpuasa, sedang menstruasi dan nifas.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual sebagai mana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?

⁹ Depag al-Qur'an dan terjemahnya, Op.Cit, foot Noot h.44

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, 2009, Jakarta, h.231-233

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Rajawali pers, 2013, Jakarta, h.158-15

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- c. Ingin mengkaji dan menganalisa menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemaksaan hubungan seksual.
- d. Ingin mengetahui dan membandingkan hukuman yang diberikan kepada pelaku menurut hukum pidana Islam dan KUHP.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berharga bagi peneliti, dan selanjutnya juga dapat memperkaya khasanah keilmuan tentang permasalahan larangan pemaksaan hubungan seksual itu sendiri.
- b. Kegunaan Secara Praktis sebagai tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang larangan pemaksaan hubungan seksual.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

2. Jenis dan Sifat Penelitian

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹²

Library research (kepuustakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Rearch Sosial*, Alumni, Bandung, 1990, h. 78

membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam dan KUHP tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Pasal 8 Undng-Undang No.23 Tahun 2004.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menyusun menguraikan secara sistematis pandangan tentang Tinjauan Hukum Islam dan KUHP tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Pasal 8 Undng-Undang No. 23 Tahun 2004.

3. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer
Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini, Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Buku Fiqh ataupun Fiqih Jinayah, KUHP, UU Penghapusan KDRT.
- b. Sumber data sekunder
Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti: Kompilasi hukum Islam, buku-buku hukum pidana, buku-buku hukum pidana Islam, dan buku-buku yang berhubungan dengan larangan pemaksaan hubungan seksual .
- c. Sumber data tersier, yaitu kamus hukum, compendium (ayat-ayat ahkam) himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.



4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer yaitu Kitab al-Qur'an dan Terjemahannya, Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian dilengkapi juga dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar memilih searahatinya data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam dan KUHP tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Pasal 8 Undng-Undang No 20 Tahun 2004. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami, serta membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, Jakarta, 1998, h. 114

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang artinya “Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk di interpretasi data dan pemahaman hasil analisa”.¹⁴

Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Metode komparatif yaitu cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam mengenai pelaku KDRT.

Menurut pengelasan Aswari Sidiq, bahwa “Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan, pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide”.

Dalam metode ini dibandingkan persamaan dan perbedaannya antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam mengenai pelaku KDRT.



¹⁴Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 127



BAB II

LANDASAN TEORI

Memang ada beberapa kiat-kiat atau tata cara yang baik yang memang harus di ketahui oleh suami dan istri, agar kehidupan seksual dalam rumah tangganya dapat terjalin dengan baik, harmonis, dan mesra.

Melakukan hubungan seksual dalam suatu perkawinan merupakan hal yang telah dilegalkan menurut hukum islam. Imam Syafi'i mengartikan nikah (perkawinan) adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan (wanita).

Justru hal tersebut adalah hal yang baik karena ditujukan untuk keberlangsungan keturunannya. Oleh karenanya sifat baik dari suatu perkawinan tersebut islam mengatur bagaimana agar hubungan seksual antara suami dan istri berjalan dengan baik.¹⁵

Apa sajakah kiat-kiat dan tata cara yang baik untuk melakukan hubungan suami istri yang baik tersebut berikut pemaparannya:

A. Pengertian Hubungan Seksual dan Pemaksaan Hubungan Seksual

Hubungan seksual atau senggama atau koitus adalah keadaan biologis berupa bertemunya alat vital pria dan wanita untuk tujuan reproduksi. Hubungan seksual ditemukan pada semua spesies makhluk hidup yang menyusui termasuk manusia, hubungan seksual secara tradisional dipandang sebagai akhir alami dari semua kontak seksual antara pria dan wanita.¹⁶

Pemaksaan hubungan seksual didalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a hanya dijelaskan secara global yaitu

¹⁵Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, ed.2 cet.5, h.2

¹⁶Sarlito, Psikologi Remaja, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h.80

setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapan pun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan atau kehendak istri.

Kriteria pemaksaan hubungan seksual tersebut terjadi bila istri di paksa untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar yaitu seks anal dan seks oral dan istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak disukai yaitu, ketika dalam keadaan haid (datang bulan/menstruasi), nifas, sakit atau bahkan sedang sakit.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi bila suami menghendaki sang istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/ kehendak istri.

Berdasarkan konteks kejadian tersebut, ada empat kriteria pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga yaitu:

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan
2. Hubungan seksual dengan ancaman
3. Hubungan seksual dengan memperurutkan selera /kehendak sendiri tanpa persetujuan pasangan
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki) tanpa memperdulikan kemampuan dan kehendak perempuan).¹⁷

Islam memandang pemaksaan hubungan seksual dalam suatu hubungan rumah tangga, dalam hal ini hubungan suami dan istri tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama Allah, karna dalam suatu ikatan pernikahan ialah terjalinnnya kebahagiaan dalam hubungan suami istri itu sendiri.

Bukan malah istri dijadikan pelampiasan hawa nafsu seorang suami yang memang benar surga seorang wanita setelah pindahnya hak dan kewajiban dari orang tua yang di batasi

¹⁷Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Gramedia Pustaka Utama, Op.Cit,foot note h.162

dengan adanya akad nikah berpindah alih kepada suami. Namun banyak pemahaman yang salah kaprah, karna merasa sudah miliknya sang istri diperlakukan seperti budak nafsu suami. Ini tidak pernah di benarkan dalam ajaran agama kita, karna pada hakekatnya pernikahan yang dapat menyakiti pasangan haram hukumnya dalam ajaran agama Islam.¹⁸

Pemaksaan hubungan seks terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (jarimah) yang telah diatur oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir yang diatur dalam QS.An-Nur ayat 2, surah an-Nur ayat 4, surah al-Maidah ayat 33, surah al-Maidah ayat 38.

Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Pemenera kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-fahish) yang ditetapkan oleh hukum syara' bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara'. Disini lah kekeliruan mendasar dari kelompok Feminis yang menganggap kejahatan diukur berdasarkan kepada gender (jenis kelamin) korban atau pelakunya, bukan pada hukum syara'.

Padahal, kejahatan hubungan perkara gender (jenis kelamin).Pasalnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan.Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan.Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.²⁰

¹⁸H.A. Djazuli, *fiqih Jinayah* (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h.1

¹⁹A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih jinayah*, Kencana, Jakarta, 2006, cet. Ke-4, h.139-140

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Iktisar Fiqih Jinayah* (Hukum Pidana Islam), UII Press, Yogyakarta, 2001, h.1

Lebih dari itu, kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama, faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada Allah dari diri individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara', termasuk melakukan tindakan KDRT.²¹

Menurut hukum Islam, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan seks dalam keluarga, hubungan seks disertai kekerasan. Yang hanya dihukum ringan. Dari sisi pendidikan, suami memiliki ketidak-pahaman mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran kepala rumah tangga dalam perilaku berhubungan suami istri yang baik. Sehingga kapitalisasi pendidikan semacam ini hanya berpihak pada orang-orang yang memang memiliki intelektual yang baik dalam berhubungan intim.²²

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah rumpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Pemaksaan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisik istri saat berhubungan seks bisa diberikan sanksi diyat. Disinilah letak pentingnya hukum Islam yang tegas dan menyeluruh.²³

Perlu pula diingat, pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga bukan sesuatu yang fitri (ada dengan sendirinya) pada diri laki-laki. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Tapi kejahatan adalah setiap hal yang

²¹H.A Djazuli, Op.Cit, h.2

²²H. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.33

²³Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003, h.245

melanggar peraturan Allah SWT, siapapun pelakunya, baik laki-laki maupun wanita.²⁴

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam dan Perundang-undangan

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Yang dimaksud hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajiban nya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinantikan hak istri merupakan kewajiban dari suami, begitu pula sebaliknya.

Secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, suami dan istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Dengan demikian suami istri haruslah saling mengerti satu sama lain dalam hal berhubungan seks, meskipun ajakan berhubungan suami istri wajib dalam Islam namun jika ada alasan yang memang dapat dibenarkan haruslah pasangan suami istri dapat saling memahami antara keduanya. Agar kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diminimalisir.²⁵

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syari'ah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2003, h.866

²⁵ Kemendageri, *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta, 1978, h.25

a. Hak dan Kewajiban Suami

Hak suami dalam Islam yaitu, hak untuk ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, hak untuk mendapatkan sikap atau penampilan yang baik dari istri serta memperoleh pemeliharaan rumah dan harta dari pencarian suami. Kewajiban nya yaitu, mendidik, menjaga, memberi nafkah, memimpin istri agar jauh lebih baik.

Islampun memandang pelecehan seksual dalam rumah tangga adalah penyalahgunaan hubungan suami istri yang merugikan salah satu pihak.²⁶

Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks suami kepada istri” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Hak suami menurut Undang-Undang yaitu, ditaati dalam hal yang benar, istri menjaga hartasuami, istri menaunkan diri dari hak-hak yang dapat menyusahkan suami, tidak berbusa masamuh terhadap suami, tidak memperlihatkan sesuatu hal yang tidak disukai suami. Kewajiban nya yaitu, setia, menolong dan membantu jika istri sedang ada masalah. Dan melindungi sang istri dari perbuatan jahat yang asal dari luar.

b. Hak dan Kewajiban Istri

Hak istri dalam Islam yang meliputi hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah. Istri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya. Nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias dan belanja sesuai dengan kondisi social dan kemampuan materinya. Kemudian ada juga hak mendapatkan perlakuan baik dari sang suami. Dan kewajiban istri dalam islam yaitu, taat dan patuh, pandai mengambil hati suami, mengatur rumah dengan baik, menghormati

²⁶ Dedi junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta, 2001, h.49

²⁷ Al-Hafidz Ibnu Al-Ashqolani, *Op.Cit*, h. foot note221

keluarga suami, mendorong suami dalam hal kebaikan, serta selalu meridhoi dan bersyukur dengan apa yang di berikan oleh suami.

Hak istri menurut Undang-undang yaitu, hak untuk mendidik anak dikala suami pergi bekerja, mendapatkan perlindungan dari suami, mendapatkan nafkah lahir dan batin nya. Sedangkan untuk kewajiban istri dalam Undang-undang yaitu, wajib tunduk pada suami, wajib melayani suami dikala ingin berhubungan suami istri, wajib mematuhi nasihat baik dari suami, dan tidak melanggar apa yang disarankan oleh suami.²⁸

Namun sangat disayangkan ketika ada penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, fiqh Islam pun membahas nya dalam bentuk-bentuk penafsiran hubungan seksual suami terhadap istri yaitu

1. hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksetujuan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal
3. hubungan seksual disertai kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.²⁹

Penafsiran-penafsiran secara parsial ini pada akhirnya membuat kesalah fahaman dalam masyarakat mengenai posisi perempuan dalam perkawinan.

Dalam al-Qur'an, fenomena seperti inipun di bahas, Paradigma Masyarakat dan Hukum Islam diperintahkan suami untuk menggauli istrinya dengan baik.³⁰

²⁸ Mulati, *Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*, Bogor, 2004, h.18

²⁹ Saleh Al-Fauzan, Op.Cit, h. foot note h.772

³⁰ Alimin M, (*Bercinta dalam Ungkapan Kitab Suci Titik temu Konsep Marital Rape dengan Gagasan Qur'an*)", Ahkam VII No.15, Jakarta, 2015, h.66

seperti yang ada dalam Surat An-Nisaa (4) : 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَنُبَوِّئَ لَكُم بِهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak)”³¹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa suami tidak bisa meminta istri untuk berzina dengan jalan paksa. Dalam melakukan hubungan seksual pun (bergaul) suami harus melakukannya secara patut. Pengertian secara patut itu sendiri dikenal dengan istilah (Muasyaroh bil ma'ruf).

Artinya segala sesuatu yang dimaklumi atau dikenali kebaikan atau kebenarannya, baik menurut aturan Allah dan Rasulnya maupun ukuran rasional manusia normal dan masyarakat banyak. Mengenai hal ini juga dijelaskan dalam hadits lain:

“Rasulullah Muhammad SAW bersabda: “Perlakukan wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka diciptakan

³¹ Mochtar naim, Kompendium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, h.104

dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang teratas, Jika kamu berusaha meluruskannya, dia akan patah. Dan jika kamu meninggalkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya.”(H.R. Al-Hafidz Al-Iraqi dan dishahihkan olehnya).

Hubungan seksual dalam pandangan hukum Islam hanya dapat dihalalkan dengan suatu akad, yaitu akad nikah. Dengan telah terjadinya akad nikah yang sah, maka hubungan seksual dihalalkan bagi dua orang (laki-laki dan perempuan) yang melakukan akad tersebut.

Dengan kata lebih singkat, akad nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual. Boleh jadi karena itulah definisi yang diberikan oleh para fuqaha tentang hal ini cenderung ke arah badan yang memberi sedah kehalalan bersenang bagi dua orang yang melakukan akad. Selain itu akad nikah juga sering diartikan dengan akad kepemilikan, kepemilikan dengan demikian selayaknya seseorang yang telah melakukan akad nikah sudah mengerti sebelumnya akan makna akad yang ia lakukan, suatu akad yang membuka pintu atau sedah pemenuhan kebutuhan biologis yang sebagaimana dikatakan oleh al-Sayyid Sabiq bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Islam bertujuan memberi jalan aman bagi hubungan seks, selain tujuan-tujuan lainnya dibenarkan akad yang memberi pengaruh langsung kehalalan bersenggama.³²

Bersenang antara dua orang yang melakukan akad, akad yang memberi pengaruh kehalalan dan kepemilikan bersenggama. Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan sebagai landasan atau pijakan pemikiran di lihat, di antaranya;³³

Rasulullah memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu, mampu lahir dan batin untuk melangsungkan

³² Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Al-Itishom, Bandung, 2006, h. 904-h.754

³³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung, 2000, h.109

pernikahan dan bagi yang belum mampu supaya berpuasa dengan tujuan untuk membentengi diri dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat (*wija'*).artinya nikah adalah satu-satunya jalan aman pemenuhan kebutuhan seksual.

Hukum menikah itu sendiri, di mana hukum yang ditetapkan dalam kitab- kitab fikih, apakah wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah bagi seseorang untuk melakukan nikah sangat bergantung kepada dorongan seksualnya seseorang.seberapa besar dorongan seksual seseorang, maka dorongan itu akan memberi pengaruh atau menjadi penentu hukum baginya untuk melakukan pernikahan.

Allah memerintahkan kepada mukmin dan mukminat supaya menjaga pandangan dan kemaluan mereka, akan tetapi ketentuan menjaga *farji* ini tidak berlaku lagi bagi dua orang yang telah melakukan akad nikah suami-istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّكَ غَيْرُ ذَا مُطَافَةٍ ۚ

Artinya: kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (Q.S:Al-Buruj: 6)³⁴

Sebuah peringatan bagi perempuan bahwa hubungan seksual antara suami-istri itu adalah kewajiban masing-masing pihak. Apabila suami mengajak, maka istri harus memenuhinya, wajib memenuhi panggilan suaminya selama tidak ada halangan syar'i.

Wajib bukan dalam arti ditetapkan berdasarkan hadis-hadis tersebut, tetapi wajib karena adanya akad nikah yang telah mereka lakukan sebelumnya, wajib karena adanya ikatan suami-istri. Karenanya kewajiban semacam itu juga berlaku bagi suami, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan batin istrinya apabila ia meminta untuk dipenuhi.

³⁴Mochtar naim, Kompedium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 475

Namun karena yang dicapai adalah kenyamanan, kedamaian, cinta, kasih sudah seharusnya suami memperhatikan keluasan dan kelapangan istrinya begitu juga istri hendaklah juga memperhatikan kesiapan suaminya.

Walaupun pada dasarnya mereka berhak menuntut dari pasangan untuk di penuhi keinginannya, tetapi hendaklah memperhatikan kondisi dan kesiapan masing- masing agar mawaddah dan warahmahnya dapat tercapai.³⁵

Dengan demikian penolakan istri terhadap ajakan suami begitupun sebaliknya untuk berhubungan badan dapat dihukumi dengan pengingkaran terhadap makna nikah itu sendiri, pengingkaran terhadap akad yang mereka lakukan sebelumnya (boleh diibaratkan sebagai salah satu bentuk wanprestasi). Bagi pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi tersebut dapat melakukan somasi (peringatan) yang dalam pelaksanaannya pertama-tama dapat ditempuh dengan jalan damai yang dengan cara memberi pengertian kepada istri.

Dengan cara tersebut jika cara-cara tersebut tidak juga berhasil dilanjutkan dengan menunjuk atau pengutusan hakim (jurisprudensi) sebagaimana dimaksud dalam Q.S An-Nisa: 34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فَصَلِّ لَهُنَّ كَمَا صَلَّيْتَ لَكَ نَفْسُكَ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ ظَلَمْتَ فَإِنَّ إِلَيْنَا إِنْصَارُكَ وَاللَّهُ يَتْلُو ظُفْرَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فَصَلِّ لَهُنَّ كَمَا صَلَّيْتَ لَكَ نَفْسُكَ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ ظَلَمْتَ فَإِنَّ إِلَيْنَا إِنْصَارُكَ وَاللَّهُ يَتْلُو ظُفْرَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

³⁵ Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur'an, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, Yogyakarta, 2004, h. 317*

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya :*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ini. Sungguhny Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (O.S. An-Nisa 4:35)*³⁶

Apabila faktor itu datang dari suami, maka ditempuh islah (perdamaian, perdamaian) sebagai upaya akhir apabila semua usaha tidak berhasil baru ditempuh pembatalan akad. Itulah aturan, aturan yang sangat lengkap dan sudah terbukti sesuai dengan kekinian.

Pengaturan yang ini menunjukkan begitu penting arti hubungan seksual dalam pernikahan, kurang harmonisan dalam rumah tangga apalagi diawali dari kurang maksimalnya hubungan badan ini. Dengan demikian, tepatlah bila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual masing-masing pihak adalah hak sekaligus kewajiban suami-istri, maka dan hakekatnya itu sendiri wathu, senggama, bercampur badan. Dengan prinsip kepemilikan mutlak suami terhadap istri, sedangkan bagi istri sebatas kehalalan saja, bukan kepemilikan mutlak sebagaimana suaminya terhadap dirinya.³⁷

³⁶Mochtar naim, Kompendium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 108

³⁷Hamim Ilyas, *Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan, Potret Perempuan :Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 157

c. **Dasar hukum larangan pemaksaan hubungan seksual menurut Islam**

Bila dikaitkan dengan hukum Islam seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمُ^ص وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :Isteri-isterimu adalah (kererti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal) yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (QS Al-Baqarah 2:223)

Lebih lanjut Rasulullah Saw bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَاشَةً فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لِعَنْتِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَ

صَبَحَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

³⁸Mochtar naim, Kompedium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h. foot note 44

Artinya :*Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda : "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Jika dipahami secara tekstual sangat terasa firman Allah dan hadis di atas memberatkan para perempuan. Hanya karena tidak menemani tidur suaminya ia akan mendapatkan laknat para malaikat. Bukan itu saja, masih banyak masyarakat yang memahami hadis ini secara tekstual dan beranggapan istri yang tidak taat kepada suami, ia termasuk istri yang nusyuz.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan:

1. membolehkan hubungan suami-istri secara paksa sama saja dengan mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderiaan orang lain (istri), ini tidak bermoral
2. dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingaran nyata terhadap prinsip *hu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf), yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an.³⁹

Dalam soal hubungan seksual, perempuan bukanlah sebagai obyek lelaki, tapi mengapa al-Qur'an melukiskan perempuan sebagai *la'nah* bagi laki-laki yang boleh ditanami bagaimana saja lelaki mau, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat: 223 sebagaimana tersebut.⁴⁰

Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini dianut, cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digarisbawahi oleh lelaki.

³⁹ Syekh Abu Bakar utsman Muhammad Syath, *I'anantut Thalibin*, Darul kutub, Bairut, 1995 juz 4, h. 166

⁴⁰ Andy Dermawan, *Op.Cit*, h. foot note 11

Padahal bila dilihat sebab ayat tersebut turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur). Jelas di sini bahwa pesan ayat itu tidak untuk memperlakukan perempuan semanya, seolah ayat itu bicara tentang tehnik main seks. Rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat oleh al-Qur'an.⁴¹

Mencermati permasalahan yang terurai di atas penulis ingin melihat pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami dari dua perspektif hukum. Mengingat pemaksaan hubungan seksual merupakan persoalan modern yang belum ada masa Rasulullah. Berdasarkan kedua aliran hukum sumber ini menanggapi pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Selain itu, dengan menggunakan tinjauan hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴²

d. Faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dalam pemaksaan hubungan seksual

1. Faktor faktor penyebab terjadinya pemaksaan dalam perkawinan

Libido yang berlebihan atau tidak berimbang dan penolakan istri untuk melakukan seksua. Suami dalam kondisi mabuk atau terganggu kesehatan jiwanya. Akibat kawin paksa. Pendapatan sumber ekonomi keluarga yang tidak berimbang. Infirmitas yang keliru terhadap teks atau nash agama. Budaya patriarki yang sudah mengakar dan sulit diubah.⁴³

2. Akibat yang ditimbulkan dari pemaksaan hubungan seksual

Adapun yang menjadi efek negatif dari marital rape secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁴¹Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, 2001, h.45-46

⁴²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali, Jakarta, 2009, h.160

⁴³Qasim Amin, *The New Women*, Terj. Syariful Alam, "Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Islam Perempuan", IRCiSOD, Yogyakarta, 2003, h. 91

- (a). Penderitaan fisik yang dialami oleh istri, yakni hubungan badan yang disertai pemaksaan tanpa melalui "pemanasan" terlebih dahulu, biasanya mengakibatkan rasa sakit istri pada wilayah reproduksinya, sehingga istri tidak bisa menikmati hubungan seksualnya.
- (b). Penderitaan batin bagi istri, mengakibatkan trauma untuk melakukan aktifitas seksual, sehingga hubungan seksual bukan dalam arti kebutuhan ibadah, tetapi lebih kepada siksaan yang menyakitkan, karena istri benar-benar diposisikan sebagai objek seksual yang tidak mempunyai kebebasan untuk menunda atau menolak.
- (c). Istri sebagai korban perkosaan sering merasa terasing dari masyarakat, ia merasa bahwa tindakan suaminya adalah karena kesalahannya.
- (d). Kekerasan yang terus menerus dilakukan mendorong istri untuk memberontak dan menentang suami yang selama ini memperlakukanya dengan kasar.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa apa yang menjadi latar belakang dan akibat yang ditimbulkan dari perkosaan suami atas istri dalam perkawinan tentu saja membawa dampak berlebih bagi berbagai pihak. Tidak dibenarkan secara medis, psikis, dan lebih-lebih agama.⁴⁴

C. Etika hubungan Seksual Dalam Islam

- a. Bersihkan diri terlebih dahulu; yaitu membersihkan tubuh dengan mandi, menyikat gigi agar tubuh segar saat berhubungan badan.
- b. Menggunakan wewangian; yaitu menggunakan farfum yang dapat membuat gairah seksual pasangan menjadi terangsang dan menambah aroma kesegaran tubuh.

⁴⁴Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual Seksualitas Teori dan Realitas, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta, 2004*, h. 143

- c. Shalat dua rakaat; yaitu sholat sunah meskipun saat manusia akan bersenang-senangpun selalu mengingat Allah sang maha pencipta.
- d. Berdandan dan berpakaian yang disukai suami atau istri; yaitu berpakaian yang dapat membangkitkan *ghorizah nau*, biasa nya pakaian seperti itu yang menggambarkan lekukan tubuh suami atau istri.
- e. Hubungan intim ditempat tertentu; yaitu hubungan seksual yang dilakukan suami dan istri ditempat yang menjadi favorit pasangan tersebut seperti, kolam renang, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, dll.
- f. Berdoa; yaitu meminta pada sang pencipta untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan keluarganya, dan kelak jika suatu hari diberikan buah hati dapat menjadi anak yang soleh dan salehah.
- g. Pemanasan; yaitu kegiatan yang dilakukan kedua pasangan suami istri dandan dan mencuci, mencumbu bagian-bagian yang sensitif dan yang diinginkan oleh pasangan mereka masing-masing.
- h. Sama-sama mendapat oleh kepuasan; yaitu bersama-sama mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam melakukan hubungan seksual.
- i. Mencuci kemaluan dan berwudhu jika mau mengulangi; yaitu membersihkan kemaluan masing-masing jika sudah selesai melakukan hubungan seksual dan jika masih mau mengulanginya lagi diupayakan untuk berwudhu untuk mendapatkan kesucian pada tubuh.
- j. Mandi besar; yaitu mandi setelah melakukan hubungan seksual.

Dengan demikian tentu akan tercipta suatu hubungan seksual antara suami dan istri yang romantis, harmonis, seperti keinginan kebanyakan pasangan suami istri diseluruh dunia ini. Kalau masing-masing pihak (suami istri) sudah berpedoman pada hal tersebut di atas tentunya masing-masing akan saling berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal tersebut, tujuan luhur tersebut tidak akan tercapai apabila hanya diupayakan oleh salah satu pihak saja, jadi harus diupayakan

oleh kedua belah pihak, tentunya dengan saling asah, asuh dan saling isi kekurangan satu dengan yang lain.⁴⁵

Kehidupan rumah tangga adalah, konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
أَمْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
مُّبِينٌ

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).⁴⁶

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan

⁴⁵Hasan Hatout, *Panduan Seks Islami*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2004, h. 31

⁴⁶Mochtar naim, *Kompedium himpunan ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan hukum*, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 266

nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisâ' [4]: 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan hendaklah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Qs. an-Nisâ' [4]: 19).⁴⁷

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli istri-istri mereka secara ma'ruf. Menurut ath-Thabari, ma'ruf adalah menunaikan hak-hak mereka, beberapa mufashir menyatakan bahwa ma'ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga.

Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru

⁴⁷ Mochtar naim, Kompendium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 104-105

menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan hidup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindarkan.⁴⁸

Allah Ta'ala memerintahkan hambaNya kawin agar mempunyai keturunan yang akan mengelola bumi ini serta isinya hingga sampai hari qiamat nanti : perintah kawin ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْكِنَانِ فَإِنَّكُمُ أَكْبَرُ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلِيمِينَ

Artinya: "Kawinlah perorangan – perempuan yang baik satu, dua, tiga dan empat istri asal mampu dan adil. Jika kamu takut tidak bisa adil kalau kawin lebih dari satu maka cukup satu saja" (QS. Surat An-Nisa:3).⁴⁹

Rasulullah SAW juga memerintah ummatnya untuk mengawini perempuan yang banyak anak dan yang dicintai: "Kawini olehmu perempuan yang memiliki banyak anak dan yang dicintai karena aku bangga dengan kamu akan umat – umat yang lain di hari kiamat."

Dalam hadis tersebut jelas tujuan dari perkawinan adalah untuk memperbanyak umat nabi di hari kiamat. Disamping itu juga tujuan kita kawin adalah untuk tenteram dan tenang

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Iktisar Fiqih Jinayah* (Hukum Pidana Islam), UII Press, Yogyakarta, 2001, h.8-9

⁴⁹ Mochtar naim, *Kompendium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum*, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 99-100

(artinya suami tenteram karena ada istri dan istri tenteram karena ada suami).Ketenteraman dan ketenangan itu membuat antara suami dan isteri saling cinta dan kasih sayang. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an yang maksudnya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

"dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu bahwa Allah menciptakan dari dirimu itu istri agar kamu tenteram dan tenang kepada mereka dan Allah jadikan antara kamu cinta dan kasih sayang" (QS. Al-Rum: 21-50)

Dan Allah menjadikan kita untuk beribadat kepadaNya. Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي
"Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Aku"
(QS. Az-Zariat: 56)⁵¹



Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa kita diciptakan Allah untuk mengelola bumi dan isinya untuk beribadat kepadaNya dan daperintahkan kawin agar terpelihara keturunan serta tenang dalam ibadah dan memperbanyak umat nabi. Setelah kita kawin kita membuat organisasi kecil dalam rumah tangga yang disebut 'Usratul Sakinah'' keluarga yang tenteram di mana dalam keluarga ini kepala keluarga adalah

⁵⁰Mochtar naim, Kompendium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 572

⁵¹Mochtar naim, Kompendium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 756

suami dan istri sebagai pendampingnya. Setelah ada anak maka anak itu adalah sebagai keluarga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.⁵²

Dalam agama Islam istri itu wajib patuh kepada suami dan suami wajib berbuat baik kepada istri. Istri mempunyai kewajiban terhadap suami dan suami punya kewajiban terhadap isteri. Kalau antara suami istri sama-sama menjaga kewajibannya terciptalah *usrotul sakinah* (keluarga yang tenang/ bahagia) tetapi kalau salah satu atau keduanya tidak saling menjaga kewajiban maka keluarga akan menjadi tidak bahagia alias berantakan (*broken home*) yang mengakibatkan terjadi kekerasan yang kadangkala suami memukul bahkan membunuh istri atau sebaliknya.⁵³

Ada beberapa kewajiban istri terhadap suami yaitu patuh terhadap perintah suami. Kalau suami mengajak istrinya berbuat maksiat maka istri tidak wajib patuh. Sabda Nabi SAW: "Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah."

Begitu juga kalau suami memarah istri pada suatu pekerjaan yang mubah atau suami wajib patuh artinya tidak melakukan perbuatan tersebut, adapun apabila ada istri yang patuh terhadap suami yaitu sebagai tersebut dalam hadits: Barangsiapa perempuan yang shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, menjaga kehormatan dan patuh kepada suami masuklah ia ke dalam surga dari pintu mana saja dia mau dan sebaliknya bila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya maka istri tersebut dilaknat (kutuk) oleh Allah dan malaikat.

Dan di antara kewajiban suami terhadap istri yaitu berbuat baik kepada istri pada rumah tempat tinggal, pada pakaian dan pada makanan tentu saja sesuai dengan kemampuan suami.

⁵²Marsum, *Jinayah* (Hukum Pidana Islam), UII, Yogyakarta, 1991, h.124-125

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, cet. Ke-2, h.29

Firman Allah dalam Al-Qur'an. Artinya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah berbelanja orang mempunyai kemampuan sesuai dengan kemampuannya. (QS. Al-Balaaq :7)⁵⁴

Agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka antara suami dan istri saling ada pengertian yaitu tahu apa kewajiban suami dan kewajiban istri. Islam memandang kekerasan itu tidak baik baik kekerasan dalam rumah tangga atau dalam masyarakat.

Dalam doa tola' bala termasuk bala kekerasan, salah satu do'a Rasul : Artinya : Ya Allah barang siapa yang lemah lembut dari kalangan kami maka berilah lemah lembut kepadanya dan barang siapa berakhlak keras dari kami maka berilah kekerasan kepadanya. Allah Ta'ala di dalam al-Qur'an menyatakan bahwa umatnya lemah lembut kepada nabi karena nabi lemah lembut dan kasuldermanyang kepada umat, andaikata Nabi main kasar dan tidak sayang kepada umatnya pasti umatnya menjauhkan dari nabi dan lemah.

Berdasarkan keterangan yang telah kita kemukakan jelas bahwa Islam menghendaki sikap lemah lembut baik dalam sosial maupun dalam keluarga dan tidak menghendaki sikap kekerasan orang-orang kafir masuk Islam pada masa Rasul karena sikap Rasul yang lemah lembut bukan karena keras dengan pedang sebagai menundukkan musuh-musuh Islam. Oleh

⁵⁴ Mochtar naim, Kompendium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 817-818

⁵⁵ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Kitab Al-Jinayah Al-Ikhlas, Jakarta, 1993, h.775

karena itu dalam hidup berkeluarga dituntut sikap lemah lembut perlakuan yang baik terhadap suami istri maupun sebaliknya.

Kalau di antara suami istri tidak boleh terjadi kekerasan maka antara bapak dengan anak atau ibu dengan anak tidak boleh juga terjadi kekerasan. Dalam hadis dijelaskan: Artinya: “Tiap-tiap anak itu lahir dalam keadaan suci maka ibu bapaknya lah yang membuat anak jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi”.

Artinya baik buruk anak sangat tergantung kepada didikan orang tua, kekerasan terhadap anak yang tidak shalat, atau tidak puasa atau anak itu main judi, minum arak dan sebagainya, gara-gara tidak diberikan pendidikan agama sangat salah, dan tidak dibenarkan dalam Islam. Berilah nasehat kepada mereka (anak) atau serahkan anak-anak itu ke bangku sekolah agama atau pondok pesantren kalau saja tidak sanggup mengajar sendiri mereka.⁵⁶

Apabila kita sudah meneliti anak kita, telah kita serahkan bangku sekolah agama atau ke pondok pesantren lalu tidak menjadi anak yang saleh, maka kita tidak salah lagi dan tidak berdosa karena sudah kita nasehati, sama seperti Nabi dengan Abu Thalib, Nabi sangat sayang kepadanya tetapi Abu Thalib yang tidak mau beriman.

Maka turunlah ayat:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا تَسْمَعُ لِمَنْ دَعَاكَ إِلَىٰ مَعَادٍ سِوَى اللَّهِ

يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“ Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”⁵⁷

⁵⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, h.770

⁵⁷ Mochtar naim, *Kompedium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum*, Hasanah, Jakarta, 2001, Op.Cit, h.foot note 552

Begitu juga anak kita, buah hati kita adalah orang kesayangan kita bila mereka tidak shalat atau tidak puasa atau mereka berjudi atau minum arak dll ,janganlah kita pukul mereka atau main kasar anggap saja mereka belum mendapat hidayat dari Allah.

Dewasa ini banyak orang tua mengeluh kelakuan anak .banyak anak –anak yang tidak mau turuti kemauan orang tuanya ,mereka lebih senang main ketimbang mengaji ,ketimbang sekolah apa lagi memondok maka terhadap anak semacam ini janganlah bersikap kasar, keras, dan memukul mereka anggap saja sudah kena ayat. Kalau bertindak kasar kita khawatir mereka melawan lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, karena tidak jarang zaman sekarang anak membunuh ayah, istri, membunuh suami seperti yang disiarkan oleh media elektronik dan media cetak apa lagi Allah menerangkan dalam Al Qur'an

قَتَلُوهُمْ يَعَذِّبُهُمْ
وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِمَّا كُنتُمْ
بِأَيْدِيكُمْ وَهَجَمْتُمْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anakmu itu musuh bagi kamu karena itu waspadalah kamu terhadap mereka (artinya berhati-hati tindakanmu terhadap mereka) (QS Al Tagabun :14)

Kesimpulannya adalah Islam tidak membolehkan ada kekerasan dalam rumah tangga, juga Islam tidak membolehkan kekerasan dalam hubungan suami istri. Islam menganjurkan ummatnya bersikap lembut, pemaaf, toleransi dan nasehat menasehat.⁵⁸

⁵⁸ Angga Nindia Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, h.83



BAB III

PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Gambaran Isi Undang-Undang PKDRT

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU-PKDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sebagai mana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsamaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang diinisiasi oleh para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Di Indonesia, secara legal dan formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya untuk menghapusi KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, Negara bias berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bias terjadi, karna dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut mungkin bias dan bias saja terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.

Dengan demikian, bias dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya

penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat dalam undang-undang PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, istri, anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagai mana dimaksud pada huruf (a) karna hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sendiri mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerja/tanah perantara dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengesampingkan perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia ini tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan **RAJINAN LAMPUNG** hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi oleh unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti.⁵⁹

a. Pengaturan Hukuman Pidana Dalam Kasus UU PKDRT

⁵⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *UU PKDRT*, Jakarta, 2004, h. 4-7

Untuk mengatasi permasalahan atau bagaimana peran keluarga terhadap pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu kiranya memahami dengan benar faktor- faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana pencegahan yang harus dilakukannya. Dengan cara demikian barulah keluarga bisa turut aktif melakukan pencegahan, perlindungan dan bila perlu membantu melakukan tindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰

Mengingat bahwa terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh adanya ketidak harmonisan hidup dalam keluarga, terjadinya konflik berkepanjangan. Bahkan pada dasarnya pernikahan adalah memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di samping untuk melanjutkan keturunan. Sesuai dengan Pasal (ayat 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

Berdasarkan uraian diatas tentunya perkawinan itu disaksikan oleh Tuhan agar masing masing pasangan menjaga harkat dan martabat untuk hidup damai sejahtera (*enjoy life*), rukun serta tanpa adanya konflik. Sebab disamping perselisihan hidup itu ditentang oleh agama juga secara moral tidak diinginkan oleh semua

⁶⁰ Kurniawan, *Analisis Yuridis Mengenai kekerasan Secara Psikis Dalam rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Thesis, Fakultas Hukum Unila, Repository, 2012, h. 7

⁶¹ Muladi, “*Beberapa Catatan Terhadap RUU KUHP*” Lemabaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), 28 September, 2006, hal 1

pihak. Namun demikian dari sekian perkawinan yang ada, banyak sekali terjadi percekcoakan dalam rumah tangga yang bisa memicu hubungan yang tidak harmonis antara suami istri dan juga rawan terjadi perselisihan diantara anggota dalam rumah tangga.⁶²

Bahkan sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan sering terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terjadi kekerasan baik fisik maupun psikologis. Kasus-kasus dalam rumah tangga khususnya terhadap istri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor dalam rumah tangga yang pada umumnya istri (wanita) yang menjadi korban. Hal ini bisa dimaklumi bahwa kaum wanita adalah kaum yang lemah dan posisi yang tentu saja sangat tidak menguntungkan.

Kaum wanita selalu dalam kondisi yang serba sulit dalam mengambil keputusan, disatu sisi dia harus menghadapi penderitaan disatu sisi menghadapi suami sebagai pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.⁶³ Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat kita lihat melalui kekerasan terhadap istri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan penelantaran.

b. Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyebabnya banyak faktor:

- a. bisa kombinasi dari banyak persoalan.
- b. faktor ekonomi.
- c. faktor pendidikan dan iman.
- d. faktor politik.

⁶² KUHP dan KUHP, *Fokusmedia*, IKAPI, Bandung, 2000, h. 19

⁶³ Ermina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 55

e. faktor konflik bersenjata.⁶⁴

Masalah ekonomi menyangkut kehidupan dan paling banyak memicu tindak kekerasan (kriminalitas), dimana menunjukan bahwa dalam beberapa penelitian di berbagai daerah faktor ekonomi selalu pada angka yang terbesar. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban PKDRT.

a. mereka sudah mapan ekonominya.

b. masyarakat miskin.⁶⁵

Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau istri simpanan. Selain itu, suami-istri stres, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat pergaulan bebas serta narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke istri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami dan istri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.⁶⁶



c. Akibat KDRT

⁶⁴ Musni Umar, " Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam rumah Tangga(PKDRT)", Makalah, Jakarta, 4 Juli 2012

⁶⁵ RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Direktorat Jendral Peraturan Perundang Undangan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, h. 4

⁶⁶ Hamidah Abdulrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No.3 Vol 7 juli, 2000, h. 448

Korban KDRT pada umumnya mengalami stres, dan depresi. Selain itu, korban KDRT juga ketakutan dan trauma. Tidak hanya itu, korban KDRT biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku yang berakhir pada perceraian. Pelaku PKDRT apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, rasa dihukum. Ada yang meminta maaf dan tobat, tapi juga tidak jarang memilih dengan jalan perceraian.⁶⁷

B. Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam UU PKDRT

Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sebagaimana terdandung dalam Pasal 8 huruf C KUHP. Dr. Tahir 2014 Tentang PKDRT menjelaskan tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini pemaksaan hubungan seksual suami terhadap sang istri.

Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami-istri dimanapun. Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Istri pun berhak melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.

Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk usaha pemerintah

⁶⁷ Dede Rsyada, *Hukum Pidana Dan Pranata Sosial*, Lembaga Study Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, h.86

untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita (istri).

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi didalam perkawinan. Sebelum mengungkap lebih jauh mengenai pemaksaan ini, harus diketahui terlebih dahulu apa arti pemaksaan itu.

Pada beberapa kasus, di saat seorang istri jatuh dalam perkawinan yang memang memiliki suami yang hiperseks, baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjatuh dan tidak tau apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri. Menurut penulis, hal itu pula yang banyak terjadi pada seorang istri yang mengalami tindak kekerasan seksual dari suaminya.

Ia takut melaporkan tindakan kekerasan suaminya ke pihak berwenang karena ia punya ketergantungan ekonomi padanya. Ia bahkan makan buah simalakama, disatu sisi jika dia tidak melaporkan akan makin tersiksa karena tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya merupakan sesuatu siklus yang berulang di sisi lainnya, jika bersedia melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya, hal yang paling pahit yang akan terjadi adalah perceraian padahal kehidupan ekonomi rumah tangga bergantung pada suami. Maka yang terjadi kebanyakan kasus adalah sang istri memilih untuk tetap bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan.⁶⁸

Sering tertulis dalam media massa untuk menggambarkan perbuatan keji berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Indonesia dengan KUHP nya yang berlaku sejak tahun 1918 telah mengualifikasikan perbuatan pemaksaan hubungan seksual ini sebagai kejahatan dengan sebutan sebagai pemerkosaan namun dalam lingkup rumah tangga, dan kejahatan ini termuat dalam KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

⁶⁸ Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Haram dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiq, Putra Pelajar, Surabaya, 2002, h. 199

Kekerasan terhadap istri harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas istri dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin istri dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya.

Hal ini banyak terjadi di Dalam hubungan keluarga, istri dan terkadang anak menjadi sasaran segala bentuk kekerasan termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap Arogansi. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekadar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisikal, psikologis dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa “penuh gairah” telah berlalu.⁶⁹

Ada beberapa variasi kasus pemaksaan “hubungan seksual” dalam rumah tangga yang kerap terjadi:

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks (memasukkan alat vital ke dalam dubur), oral seks (memasukkan alat

⁶⁹Masdar F. Mas’udi, *Op.Cit*,h.foot note 10

vital ke dalam mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.

2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya lagi.
4. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
5. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
6. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid atau menstruasi.
7. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengemukakan ancaman serta caci maki.
8. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda-benda ke dalam kewanitaannya, mengoleskan lemak ke kewanitaannya, menggunting rambut kewanitaannya, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

Dalam hidup ini tidak jarang ada sesuatu yang tidak ingin kita alami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, yang artinya kehidupan didepan kita adalah rahasia Allah, untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan.⁷⁰

⁷⁰ Bambang Haryanto, *Pidana danteori-teori Pemidanaan*, Pita gema, Bandung, 2008, h.9

Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani dengan cara:

1. Istri dan suami lakukan dialog, Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak (suami).
2. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin, Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.
4. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka maka dilakukan risum.
5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT, Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.⁷¹

Pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dapat dihapuskan menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang baru saja berlaku. Sebelum berlakunya UU PKDRT, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum pidana kita. Hukum pidana hanya mengatur hukuman bagi kasus perkosaan dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa” Jadi, pasal perkosaan ini mengecualikan istri sebagai salah satu potensi korban perkosaan.

⁷¹ Febri Yulliani, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Unair, 2008

Pengaturan ini menunjukkan perkawinan sebagai dasar terbentuknya sebuah keluarga dianggap sebagai sebuah lembaga tersendiri di wilayah pribadi yang terpisah dengan wilayah publik (umum). Jika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, Negara enggan untuk ikut campur karena dipandang sebagai urusan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan sendiri. Pasal 285 KUHP ini juga membatasi ketentuan pemaksaan hubungan seksual hanya dalam bentuk persetubuhan, padahal banyak cara pemaksaan yang dilakukan diluar bentuk tersebut 'seperti apa pemaksaan hubungan seksual yang pernah terjadi.

Berdasarkan pasal 8 UU PKDRT, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Secara lebih khusus, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 8 huruf a UU PKDRT di jelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai.

C. Sangsi Bagi Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual

Menurut pasal 46 UU PKDRT pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga akan dikenakan ancaman pidana sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁷²

Sedangkan hukum Pidana Dasar hukumnya adalah pada, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban menderit jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kematian korban , pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).⁷³

⁷² Ermanjah djaya, “KUPH KHUSUS Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Pidana Khusus”, Sinar Grafika, Cetaan kedua, Jakarta, 2009, h. 801

⁷³ Martha, *Perempuan dan Kekerasan*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2012, h. 69

Negara tidak memperkenankan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istrinya itu terjadi dalam ruang lingkup keluarga (rumah tangga), karna bukan itu tujuan suatu pernikahan yang diinginkan semua pasangan. Namun jika itu masih saja terjadi maka hukum telah mengaturnya sedemikian baik, agar semua pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat berfikir seribu kali jika ingin melakukan tindakan keji yang di benci Allah dan tidak dibenarkan dalam tatanan moral bangsa Indonesia .

Banyak perbedaan antara hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, yang pasti hukum Islam selalu merujuk kepada hukum Allah yang abadi dan kekal yang terdapat dalam al-Qur'an sedangkan hukum pidana Indonesia yang merujuk pada KUHP.





BAB IV ANALISIS DATA

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. kekerasan seolah sebuah perlakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk memperlakukan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi memperlakukan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan menimbulkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban.

Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering diabaikan oleh masyarakat karena pemahaman ini dianggap terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam peristiwa pelecehan seks dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Islam memandang kekerasan dalam suatu hubungan rumah tangga, dalam hal ini hubungan suami dan istri tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama Allah, karna makna dalam suatu ikatan pernikahan ialah kebahagiaan dalam hubungan suami istri itu sendiri.

Bukan malah istri dijadikan pelampiasan hawa nafsu seorang suami yang memang benar surga seorang wanita setelah pindahnya hak dan kewajiban dari orang tua yang di batasi dengan adanya akad nikah berpindah alih kepada suami. Namun banyak pemahaman yang salah kaprah, karna merasa sudah miliknya sang istri diperlakukan seperti budak nafsu suami. Ini tidak pernah di benarkan dalam ajaran agama kita, karna pada hakekatnya pernikahan yang dapat menyakiti pasangan haram hukumnya dalam ajaran agama Islam.

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap UU PKDRT Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan, pemaksaan seperti ini seolah sebuah perlakuan yang biasa saja dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari.

Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan ketidakadilan pada pihak korban (istri).

Islam pun memandang pelecehan seksual dalam rumah tangga adalah penyalahgunaan hubungan suami istri yang merugikan salah satu pihak. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks suami kepada istri” itu adalah sesuatu yang biasa saja sudah selumitnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Dalam al-Qur'an, fenomena ini pun dibahas, Paradigma Masyarakat dan Hukum Islam diperintahkan suami untuk menggauli istrinya dengan cara seperti yang ada dalam

Surat An-Nisaa (4) : 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بَفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sebagaimana terkandung dalam pasal 8 huruf C UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini pemaksaan hubungan seksual suami terhadap sang istri.

Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami-istri dimana Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, apabila istrinya tersebut melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.

Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. UU PKDRT adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam

keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita (istri). Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi didalam perkawinan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pasal 8 UU No 23 tahun 2004 Kekerasan Seksual sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yg dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
2. Sebuah peringatan bagi kaum perempuan bahwa hubungan seksual antara suami-istri itu adalah kewajiban masing-masing pihak. Apabila suami mengajak, maka istri harus memenuhinya, yaitu memenuhi panggilan suaminya selama tidak ada halangan syar'i.

Wajib bukan dalam arti ditetapkan berdasarkan hadis-hadis tersebut, tetapi wajib karena adanya akad nikah yang telah mereka lakukan sebelumnya, wajib karena adanya ikatan suami-istri. Karenanya kewajiban semacam itu juga berlaku bagi suami, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan batin istrinya apabila ia meminta untuk dipenuhi.

Namun karena yang dicapai adalah kenyamanan, kedamaian, cinta, kasih sudah seharusnya suami memperhatikan keluasan dan kelapangan istrinya begitu juga istri hendaklah juga memperhatikan kesiapan suaminya.

Walaupun pada dasarnya mereka berhak menuntut dari pasangan untuk di penuhi keinginannya, tetapi hendaklah memperhatikan kondisi dan kesiapan masing- masing agar mawaddah dan warahmahnya dapat tercapai.

Dengan demikian penolakan istri terhadap ajakan suami begitupun sebaliknya untuk berhubungan badan dapat dihukumi dengan pengingkaran terhadap makna nikah itu sendiri, pengingkaran terhadap akad yang mereka lakukan sebelumnya (boleh diibaratkan sebagai salah satu bentuk wanprestasi). Bagi pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi tersebut dapat melakukan somasi (peringatan) yang dalam pelaksanaannya pertama-tama dapat ditempuh dengan jalan damai yaitu dengan cara memberi pengertian kepada istri.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran dari seorang suami untuk memahami kondisi seorang istri agar terciptanya keluarga yang harmonis dan berakhlak.
2. Perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.
3. Kepada para pembaca ini, semoga tulisan ini memberi informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum-hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Absul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah, 2009, Jakarta,
- Abu malik kamal bin sayyid salim, *Shahih fiqih sunah Wanita*, Al-hambra, 2012, Solo
- Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Haram dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiqi Putra Pelajar, Surabaya, 2002
- Alimin M, (*Bercinta dalam Ungkapan Kitab Suci Titik temu Konsep Marital Rape dengan Gagasan Qur'an*)", Ahkam VII Nolla, Jakarta, 2011
- Amir Syariffudin, *Opis-garis Besar Pem*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur'an, Tela'ah Ulang Masalah Seksualitas PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA*, Yogyakarta, 2004
- Bambang Haryanto, *Pidana*, IAIN PADJARAN, Bandung, 2008
- Dede Rsyada, *Hukum Pidana Dan Pranata Sosial*, Lembaga Study Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual SeksualitasTeori dan Realitas, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan TheFord Foundation*, Jakarta, 2004
- Ermanjah djaya, "*KUPH KHUSUS Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang Undang Pidana Khusus*", Sinar Grafika, Cetaan kedua, Jakarta, 2009

Febri Yulliani, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Unair, 2008

Hamidah Abdulrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No.3 Vol 7 juli, 2000

Hamim Ilyas, *Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan, Potret Perempuan :Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Baru*, PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

Hasan Hatout, *Undang-Undang Seks Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2004

Husein Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan*, LKIS, Yogyakarta, 2004

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1990

Khancil, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Martha, *Perempuan dan Kekerasan*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2012

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung, 2000

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Mochtar naim, *Kompedium himpunan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum*, Hasanah, Jakarta, 2001

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*



dan Kompilasi Hukum Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, ed.2 cet.5

Muhammad Fu'ad Abdul Bagi (penyusun), *Mutiara hadits shahih Bukhari Muslim*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2009

Muhammad Taufik Makarao, *Penghapusan PKDRT*, Rineka Cipta, 2012, Jakarta

Muladi, "*Beberapa Catatan Terhadap RUU KUHP* "Lemabaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), 28 September, 2006

Musni Umar," *Penegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam rumah Tangga PKDRT*",Makalah ,Jakarta, 4 Juli 2012

Qasim Amin, *The New Women Ten Spiritual Alam*, "*Sejarah Penindasan Perempuan Menggusur Islam Laki-laki, Menggusur Islam Perempuan*", ArdiSCO, Yogyakarta, 2003

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan KDRT*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, Politea, Bogor, 1976

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, Jakarta, 1998,

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Rajawali pers, 2013, Jakarta,

UU RI No.23 Th.2004, *Undang-Undang Penghapusan PKDRT*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007



